

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

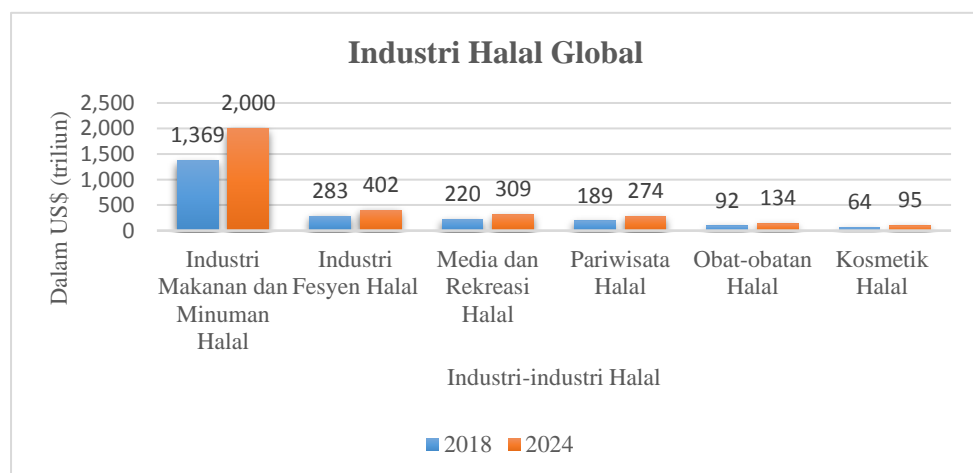
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Industri halal yang terdiri dari sektor keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, kosmetik, dan obat-obatan mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga menarik perhatian dari negara-negara mayoritas muslim maupun non-muslim (Dinar Standard, 2019). Di antaranya adalah Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menjadikan industri halal sebagai salah satu kontributor utama dalam perekonomian negara (Sukoso et al., 2020). Di sisi lain, terdapat negara-negara mayoritas non-muslim seperti Brazil, Filipina, Inggris, dan China yang memanfaatkan kesempatan ini dengan memproduksi barang-barang halal (Katadata, 2020).

Fenomena di atas disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah penambahan penduduk muslim global dari 1,7 Miliar di 2014 menjadi 2,2 Miliar di tahun 2030 (Dinar Standard, 2019; Mohamed et al., 2020), permintaan terhadap kebutuhan produk-produk halal meningkat (Awan et al., 2015), peningkatan kesejahteraan yang diproyeksikan Produk Domesti Bruto (PDB) negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tumbuh 6,2% pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan global sebesar 5,8% (Izberk-Bilgin dan Nakata, 2016; Dinar Standard, 2019), diterimanya produk halal di kalangan non-muslim (Rezai et al., 2012), tingginya tingkat kesadaran masyarakat muslim dunia dalam memilih produk yang akan mereka pakai di mana sekitar 76,3% muslim menganggap agama “sangat penting” dan 96% wisatawan Muslim sangat mempertimbangkan faktor ketersediaan makanan halal (Fathi et al., 2016; Islam dan Madkouri, 2018; Dinar Standard, 2019). Selain itu juga, partisipasi perusahaan multinasional dalam industri makanan dan minuman halal meningkat hal ini juga mengisyaratkan pentingnya ekonomi islam dalam mendorong pertumbuhan bisnis (Dinar Standard, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, banyak negara berlomba-lomba menjadi pusat halal dunia di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan UEA. Tidak ketinggalan, negara-negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara lainnya yang serius menggarap industri halal. Keseriusan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dituangkan dalam strategi nasional, seperti Indonesia yang mengeluarkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (2019-2024)*, Arab Saudi yang mengeluarkan *Arab Saudi's Vision 2030*, Filipina yang meluncurkan logo halal untuk mendorong ekspor, dan Korea Selatan yang mendukung pengembangan industri kosmetik dan obat-obatan halal serta masih banyak lagi negara yang melakukan hal tersebut (Dinar Standard, 2019).

Adapun salah satu dari sekian sektor industri halal, industri makanan dan minuman halal merupakan industri yang paling tinggi pertumbuhannya dengan pengeluaran di sektor tersebut pada tahun 2018 sebesar US\$ 1.37 triliun atau tumbuh 5.1% dan diprediksikan tiap tahunnya tumbuh 6.3% mencapai US\$ 2 triliun di tahun 2024 (Dinar Standard, 2019).



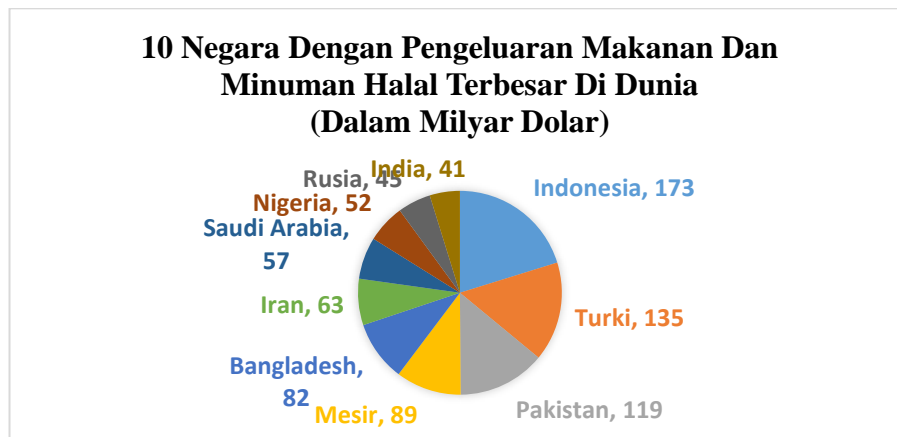
*Gambar 1. 1*

*Pertumbuhan Industri Halal Global*

Sumber: Dinar Standard (2019)

Indonesia sendiri adalah negara dengan pengeluaran untuk makanan dan minuman halal paling besar dengan pengeluaran per-tahun 173 Milyar US Dolar atau 2.463 Triliun Rupiah. (Dinar Standard, 2019). Faktor utamanya merupakan jumlah penduduk yang besar dengan penduduk terbanyak ke-empat di dunia yakni

dengan jumlah penduduk 277 juta jiwa atau sekitar 13% populasi muslim dunia (World Population Review, 2021).



*Gambar 1.2*

*10 Negara dengan Pengeluaran Makanan dan Minuman Halal Terbesar di Dunia (Dalam Milyar Dolar)  
Dinar Standard (2019)*

Meskipun Indonesia sebagai negara terbesar dalam pengeluaran untuk makanan dan minuman halal, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain dalam memproduksi makanan halal (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Hal ini dibuktikan dengan dua fakta yaitu ekspor produk halal Indonesia ke pasar global hanya sebesar 3,8% dan Indonesia tidak masuk ke dalam 10 negara penghasil makanan dan minuman halal terbesar di dunia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019; Dinar Standard, 2019).

No	Negara
1	Uni Emirat Arab
2	Malaysia
3	Brazil
4	Australia
5	Sudan
No	Negara
6	Pakistan

7	Oman
8	Brunei
9	Turkey
<b>No</b>	<b>Negara</b>
10	Iran

*Tabel 1. 1*

*Daftar 10 Negara Penghasil Makanan dan Minuman Halal Terbesar di Dunia*

*Sumber: Dinar Standard (2019)*

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, Indonesia telah meluncurkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (2019-2024)* sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam menggarap industri halal. Dalam *masterplan* tersebut dijelaskan bahwa Indonesia memiliki empat strategi utama untuk menjadikan sebagai pusat halal dunia. Adapun ke-empat strategi utama tersebut sebagai berikut; 1) Penguatan *Halal Value Chain*; 2) Penguatan Keuangan Syariah; 3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan 4) Penguatan Ekonomi Digital. Di antara empat strategi utama tersebut yang berhubungan langsung dan yang memiliki dampak yang paling signifikan dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal adalah yang pertama di mana dalam strategi tersebut terdapat sejumlah program-program yaitu Halal Hub Daerah, Sertifikasi Halal, Kampanye *Halal Lifestyle*, Insentif Investasi, dan Kerjasama Internasional (BAPPENAS, 2019).

Dalam hal ini, penulis menyoroti peran dari daerah untuk menyukseskan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* di antaranya adalah sebagai Halal Hub Daerah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai daerah memiliki peran yang strategis dalam memajukan ekonomi syariah (KNEKS, 2019). Namun, peran daerah di Indonesia dalam industri halal pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan.

Seperti daerah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat yang memiliki potensi dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya adalah minimnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau industri rumahan yang memiliki perizinan Produksi Industri Rumah

Tangga (P-IRT) dan label halal hanya baru 15.000 produk 35-40% (Nurhasanudin, 2019). Hal ini sangat disayangkan karena industri makanan dan minuman sendiri di Kabupaten Tasikmalaya merupakan jenis industri paling banyak dengan jumlah 4.206 unit (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2021).

Pertumbuhan industri makanan dan minuman di daerah tersebut terbilang cukup pesat dikarenakan selera masyarakat terhadap kuliner yang sangat tinggi. Daerah yang terletak di Priangan Timur ini juga memiliki daya tarik pariwisata yang baik pesona alam maupun kebudayaan yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti Goa Safawardi dan Kampung Naga (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Tasikmalaya, 2021). Hal ini menjadi potensi yang baik apabila industri pariwisata dapat dikolaborasikan dengan industri makanan dan minuman halal, sebagaimana yang tertuang dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (BAPPENAS, 2019).

Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan memiliki banyak pesantren-pesantren yang tersebar di penjuru daerah yang dapat mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman halal. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengoptimalkan peran pesantren untuk inklusi keuangan syariah (Kompas, 2021).

No	Jenis Industri	Jumlah
1.	Makanan	4.206
2.	Pengolahan Kayu	2.582
3.	Tekstil	668

Tabel 1. 2

Jumlah Industri di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Selain fakta-fakta empiris di atas, terdapat juga penelitian-penelitian yang menguatkan bahwa di Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal dalam hal regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur halal, pemasaran, dan keuangan syariah. Di antaranya adalah penelitian Widiastuti et al.,

(2020) yang mengungkapkan faktor penyebab masih sulit berkembangnya industri halal di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, produksi dan pemasaran yang belum optimal, infrastruktur masih terbatas, sumber daya manusia belum berkompeten. Penelitian Amalia dan Nur Hidayah (2020) juga menguatkan bahwa kurangnya dukungan dari industri keuangan syariah menjadi penyebab terhambatnya perkembangan industri halal di Indonesia. Di sisi lain, penelitian Susanty et al., (2020) menemukan bahwa produsen makanan di Indonesia masih sulit dalam menerapkan logistik halal dikarenakan masih rendahnya komitmen perusahaan dan dukungan infrastruktur belum memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut dibahas juga oleh Sukoso et al., (2020) dalam bukunya yang berjudul “Ekosistem Industri Halal” di mana terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan industri halal di antaranya adalah rendahnya kesadaran baik konsumen maupun produsen, infrastruktur halal yang kurang lengkap, kekurangan sumber daya manusia sebagai auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal, dan perangkat-perangkat terkait. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia diperlukan usaha yang konkrit untuk mengurai permasalahan-permasalahan tersebut di tingkat daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih belum terdapat penelitian yang membahas hal tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty. Metode ini telah banyak digunakan untuk alat pengambilan keputusan untuk penelitian di berbagai bidang, seperti mesin, makanan bisnis, lingkungan, kesehatan, dan pemerintahan (Sipahi & Timor, 2010). Dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) memungkinkan untuk menetapkan aspek atau indikator apa yang memiliki prioritas paling tinggi dengan menghitung nilai-nilai yang subjektif dari para ahli. Metode AHP memiliki keunggulan dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya di antaranya adalah AHP dapat membuat permasalahan yang kompleks menjadi model yang fleksibel (Syafnidawaty, 2020), dapat mengombinasikan kriteria kualitatif dan kuantitatif (Sequeira dan Adlemo, 2021), dan konsistensi hasil penilaian para ahli dapat diukur sehingga mengurangi bias dalam penelitian (Qubaisi et al., 2016).

Berdasarkan hal tersebut, judul skripsi yang penulis ajukan adalah “**Prioritas Strategi Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Halal di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain dalam memproduksi makanan halal di mana Indonesia tidak termasuk kedalam 10 negara dengan penghasil makanan halal terbanyak di dunia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).
2. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, infrastruktur yang belum memadai, pemasaran dan produksi yang belum optimal (Widiastuti et al., 2020)
3. Industri keuangan syariah belum mendukung secara baik terhadap pengembangan industri makanan dan minuman halal (Amalia & Nur Hidayah, 2020)
4. Industri makanan dan minuman kesulitan dalam menerapkan logistik halal (Susanty et al., 2020)
6. Masih sedikitnya produsen makanan dan minuman di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki sertifikasi P-IRT dan label halal sekitar 35-40% (Nurhasanudin, 2019).
7. Belum adanya riset mengenai strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Diantara aspek masalah regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur halal, pemasaran, dan keuangan syariah, aspek mana yang menjadi masalah prioritas paling tinggi?

2. Indikator masalah apa yang menjadi prioritas paling tinggi dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Diantara aspek solusi regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur halal, pemasaran, dan keuangan syariah, aspek mana yang menjadi solusi prioritas paling tinggi?
4. Indikator solusi apa yang menjadi prioritas dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prioritas masalah dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal beserta prioritas solusinya dengan melibatkan beberapa aspek yang mempengaruhi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yaitu aspek pemerintah, aspek sumber daya manusia (SDM), aspek infrastruktur, aspek pemasaran, dan aspek keuangan syariah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam guna memperbanyak konsep dan teori mengenai industri makanan dan minuman halal. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, pelaku usaha, konsumen, investor dan pihak lainnya.